

## **Pengaruh Faktor Demografi, Sosial dan Ekonomi terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia**

**Diah Permata Sari<sup>1\*</sup>, Vita Fitria Sari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

\*Korespondensi: [diahp1322@gmail.com](mailto:diahp1322@gmail.com)

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the influence of demographic, social, and economic factors on the financial sustainability of local governments in Indonesia. This empirical study, conducted in districts/cities in 2022, intends to answer research questions related to the influence of demographic, social, and economic factors on financial sustainability. This research has a novelty by adding social factors in testing their influence on financial sustainability. The sampling technique was carried out using purposive sampling, with the multiple regression analysis method assisted by the SPSS version 25 program. The results showed that of the seven variables studied, three variables showed a significant influence on financial sustainability, namely population, GRDP, and investment level. Meanwhile, other variables such as population density, population age below 15 years, population age above 65 years, and education level did not show a significant influence on financial sustainability. The findings of this study make an important contribution to understanding the factors that influence the financial sustainability of local governments in Indonesia.*

**Keywords:** *Factor Demographic; Factor Social; Factor Economic; Financial Sustainability; Local Governments.*

### **How to cite:**

Sari, D. P., & Sari, V. F. (2025). Pengaruh Faktor Demografi, Sosial dan Ekonomi terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 3 (3) 267-282. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v3i3.139>

---

### **PENDAHULUAN**

Penerapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah menghadirkan era baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Salah satu aspek krusial dalam implementasi otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara berkelanjutan (*financial sustainability*) untuk menjamin keberlangsungan layanan publik yang berkualitas.

Konsep *financial sustainability* di sektor publik menjadi semakin relevan, terutama setelah krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan signifikan pada keuangan pemerintah daerah. *Financial sustainability* didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan berkesinambungan kepada masyarakat, baik saat ini maupun di masa depan, guna mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rodríguez Bolívar et al., 2016).

Berbagai faktor eksternal dapat mempengaruhi *financial sustainability* pemerintah daerah, khususnya faktor demografi, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, dengan karakteristik geografis yang beragam dan disparitas pembangunan antar daerah yang signifikan, pemahaman tentang pengaruh faktor-faktor ini menjadi sangat penting. Faktor demografi seperti ukuran populasi, kepadatan populasi, dan ketergantungan populasi dapat mempengaruhi beban layanan publik dan basis pajak daerah. Faktor sosial seperti tingkat pendidikan berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara faktor ekonomi seperti PDRB dan tingkat investasi berkontribusi pada kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis faktor sosial sebagai tambahan dari faktor demografi dan ekonomi yang telah diteliti sebelumnya oleh Santis (2020). Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan pengukuran *financial sustainability* berbasis laporan operasional yang disesuaikan sebagaimana digunakan oleh Rodríguez Bolívar et al. (2016), yang lebih relevan dengan konteks Indonesia mengingat penerapan standar akuntansi berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Ketiga, penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang *financial sustainability* dalam konteks negara kepulauan dengan keragaman karakteristik daerah.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor demografi (ukuran populasi, kepadatan populasi, ketergantungan populasi), faktor sosial (tingkat pendidikan), dan faktor ekonomi (PDRB dan tingkat investasi) mempengaruhi *financial sustainability* pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pencapaian *financial sustainability* yang lebih baik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang *financial sustainability* sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di negara berkembang. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan *financial sustainability*, serta bagi pemerintah pusat dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung kemandirian keuangan daerah.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### ***Neo-Institutionalism Theory***

*Neo-institutionalism theory* merupakan kerangka teoritis utama yang mendasari penelitian ini. Teori ini berfokus pada bagaimana aturan formal dan informal membatasi dan membentuk perilaku individu dan kelompok dalam suatu institusi. Menurut DiMaggio & Powell (2010), teori ini menggambarkan lembaga tidak hanya dari fitur

formalnya, tetapi juga aspek non-formalnya, serta dapat menjelaskan institusi formal seperti sistem hukum, agama, ekonomi, dan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori neo-institutionalisme menjelaskan bagaimana lingkungan sebagai konstruksi sosial mempengaruhi perilaku organisasi dan anggotanya (Riahi & Khoufi, 2019). Teori ini menekankan bahwa penduduk sebuah daerah dapat mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait masalah sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah seringkali dipaksa untuk membelanjakan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mempertahankan keuangan (Subires et al., 2019).

### ***Financial sustainability* Pemerintah Daerah**

Konsep *financial sustainability* telah mengalami evolusi dari fokus sebelumnya yang hanya menekankan pada kondisi keuangan (*financial condition*) dan kesulitan keuangan (*financial distress*). Perbedaan mendasar terletak pada orientasi waktunya, dimana *financial condition* dan *financial distress* lebih berfokus pada informasi keuangan masa lalu, sementara *financial sustainability* memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang kemampuan mempertahankan layanan publik untuk generasi mendatang (Pedro & Bolívar, 2017).

IPSASB (2013) mendefinisikan *financial sustainability* sebagai kemampuan organisasi sektor publik untuk memenuhi komitmen keuangan dan layanan publik, baik saat ini maupun di masa depan. IPSASB menekankan pentingnya mempertimbangkan tiga dimensi utama: pendapatan, layanan, dan utang. Dalam menilai ketiga dimensi ini, perlu dipertimbangkan dua aspek penting: kemampuan pemerintah dalam mengendalikan dimensi-dimensi tersebut dan ketergantungan pemerintah pada faktor eksternal yang sulit dikendalikan.

Dalam penelitian ini, pengukuran *financial sustainability* mengadopsi pendekatan yang dikembangkan oleh Rodríguez Bolívar et al. (2016), yang menggunakan laporan operasional yang telah disesuaikan dengan menghilangkan pos-pos luar biasa. Pendekatan ini dipilih karena beberapa alasan: Pertama, laporan operasional memberikan informasi komprehensif tentang penggunaan sumber daya dalam penyediaan layanan publik. Kedua, pendekatan berbasis akrual memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan pengeluaran aktual, proyeksi biaya masa depan, dan pemanfaatan investasi modal. Ketiga, surplus pada laporan operasional yang disesuaikan dapat menjadi indikator yang efektif untuk menilai stabilitas keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang (Rodríguez Bolívar et al., 2018).

### **Faktor Demografi**

#### *Population Size*

Ukuran populasi merujuk pada jumlah total individu yang mendiami suatu wilayah geografis tertentu pada waktu tertentu, sesuai definisi United Nations Population Division. Variabel ini mencerminkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek pengelolaan pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh Subires et al. (2019).

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel ukuran populasi menggunakan indikator total populasi. Indikator ini dipilih karena memberikan gambaran yang jelas dan langsung tentang jumlah keseluruhan penduduk dalam suatu wilayah,

memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik demografis wilayah yang diteliti.

### *Population Density*

Kepadatan populasi, menurut United Nations Population Division, didefinisikan sebagai jumlah individu per unit area, biasanya dinyatakan dalam orang per kilometer persegi atau mil persegi. Variabel ini mencerminkan distribusi penduduk dalam suatu wilayah dan memiliki implikasi signifikan terhadap berbagai aspek pengelolaan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan publik, alokasi sumber daya, dan *Financial sustainability* sesuai temuan Subires et al. (2019).

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel kepadatan populasi menggunakan indikator jumlah penduduk yang tinggal di kotamadya dibagi dengan luas area dalam kilometer persegi. Indikator ini dipilih karena memberikan gambaran yang spesifik tentang konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan, yang umumnya merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

### *Dependency Population*

Ketergantungan populasi merujuk pada proporsi penduduk yang dianggap tidak produktif secara ekonomi, diukur melalui rasio yang membandingkan jumlah penduduk usia non-produktif (anak-anak di bawah 15 tahun dan lansia di atas 65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun), sesuai penelitian Santis (2020).

Dalam penelitian ini, variabel ini diukur dengan dua sub-rasio: 1) Jumlah populasi muda, yaitu proporsi penduduk di bawah 15 tahun yang mencerminkan beban demografis anak-anak dan remaja, dan 2) Jumlah populasi tua, yaitu proporsi penduduk di atas 65 tahun yang menggambarkan beban demografis lansia yang tidak aktif secara ekonomi.

## **Faktor Sosial**

### *Education Level*

Menurut UNESCO, tingkat pendidikan didefinisikan sebagai ukuran pencapaian pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh individu dalam suatu populasi. Tingkat pendidikan mencakup jenjang seperti sekolah dasar, menengah, sarjana, dan pascasarjana, serta dianggap sebagai indikator penting potensi ekonomi dan kesejahteraan finansial (Rodríguez Bolívar et al., 2016).

Dalam konteks *Financial sustainability* pemerintahan daerah, tingkat pendidikan penduduk memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Dalam penelitian ini, variabel tingkat pendidikan diukur menggunakan indikator Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

## **Faktor Ekonomi**

### *Produk Domestik Regional Bruto*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi kunci yang mengukur total nilai produksi barang dan jasa dalam suatu daerah selama periode tertentu. PDRB mencerminkan ukuran ekonomi daerah, struktur ekonomi, tingkat produktivitas, dan potensi pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks *Financial sustainability* pemerintahan daerah, PDRB memiliki peran penting karena nilai yang tinggi dan tumbuh konsisten mengindikasikan ekonomi daerah yang kuat. Pertumbuhan PDRB, yang dihitung dengan membandingkan

perubahan nilai dari tahun ke tahun, berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi (Tri Wardhani, 2020).

#### *The level of Investment*

Tingkat investasi merujuk pada jumlah modal yang ditanamkan dalam berbagai sektor ekonomi, baik oleh investor domestik maupun asing, mencakup aset tetap dan modal kerja (Santis, 2020). Investasi memiliki hubungan erat dengan *Financial sustainability* pemerintahan daerah karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi.

Dalam penelitian ini, variabel tingkat investasi diukur melalui proporsi pengeluaran pemerintah kota yang dialokasikan pada proyek jangka panjang, yaitu belanja modal (Santis, 2020).

#### **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap *Financial sustainability***

Ukuran populasi memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah. Penelitian Sinervo (2020) dan Rodríguez Bolívar et al. (2016) menunjukkan bahwa peningkatan ukuran populasi berkorelasi dengan penurunan *financial sustainability*, terutama melalui peningkatan utang dan pengeluaran publik.

H1: Ukuran populasi berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah.

#### **Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap *Financial sustainability***

Hipotesis kedua dalam penelitian Subires et al. (2019) menyelidiki pengaruh kepadatan populasi (*population density*) terhadap *Financial sustainability* dalam kerangka Neo-Institutionalism Theory. Teori ini membantu memahami bagaimana faktor-faktor institusional dan struktural, termasuk karakteristik populasi, dapat mempengaruhi hasil ekonomi dan keuangan.

H2: Kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*.

#### **Pengaruh Ketergantungan Penduduk Terhadap *Financial sustainability***

Dalam kerangka Neo-Institutionalism Theory, penelitian Santis (2020) mengkaji pengaruh ketergantungan populasi terhadap *Financial sustainability*. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana struktur demografis dapat mempengaruhi institusi dan hasil ekonomi, termasuk *Financial sustainability* pemerintah.

H3: Penduduk usia di atas 15 tahun berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability*.

H4: Penduduk usia di bawah 65 tahun berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability*.

#### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Penduduk Terhadap *Financial sustainability***

Rodríguez Bolívar et al. (2016) mengemukakan argumen kunci tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan *Financial sustainability*. Teori Neo-Institutionalism membantu menjelaskan bagaimana faktor sosial seperti pendidikan dapat mempengaruhi struktur dan hasil ekonomi.

H5: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*.

### **Pengaruh PDRB Terhadap *Financial sustainability***

Dalam konteks penelitian, hipotesis mengacu pada temuan Tri Wardhani (2020) yang menyelidiki pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap *Financial sustainability* dalam kerangka Neo-Institutionalism Theory.

H6: PDRB berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*.

### **Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap *Financial sustainability***

Penelitian Santis (2020) menjelaskan potensi signifikan investasi dalam menciptakan arus pendapatan berkelanjutan. Analisis ini berada dalam kerangka Neo-Institutionalism Theory untuk menjelaskan bagaimana keputusan investasi mempengaruhi struktur dan hasil keuangan jangka panjang.

H7: Tingkat investasi berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Populasi Dan Sampel**

Penelitian asosiatif kausal ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 kabupaten dan kota di Indonesia berjumlah 514 dengan rincian kabupaten berjumlah 416 dan kota berjumlah 98. Pada penelitian ini pemilihan sampel menggunakan kombinasi metode purposive sampling. Penggunaan purposive sampling diperlukan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih memenuhi kriteria penting bagi penelitian (Sugiyono, 2017).

**Table 1. Populasi dan Sample**

No	Keterangan	Kabupaten/Kota
1	Jumlah Kabupaten/Kota Di Indonesia	514
2	Kabupaten/Kota Website yang Tidak Aktif	(40)
3	Kabupaten/Kota Yang Tidak Tersedianya Data Kependudukan, Sosial dan Ekonomi Komprehensif (Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Ketergantungan Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Investasi)	(174)
4	Jumlah Sample	300

*Sumber : diolah oleh penulis dengan Microsoft Excel, 2024*

Berdasarkan perhitungan, diperoleh sampel representatif sejumlah 300 yang mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan satu tahun, yaitu tahun 2022, sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 300.

### **Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit, diperoleh dari website resmi pemerintah daerah, e-

ppid.bpk.go.id, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode tahun 2020-2022. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi.

### **Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *Financial sustainability*. *Financial sustainability* pada penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan oleh (Rodríguez Bolívar et al., 2016) yaitu menggunakan laporan operasional yang disesuaikan dengan menghilangkan komponen luar biasa.

Variable independent pada penelitian ini yaitu, Population Size (Ukuran Populasi) Ukuran populasi (PopSize) Ini digambarkan sebagai populasi yang tinggal di kotamadya, dan memang demikian diukur melalui logaritma natural populasi.

Population Density (Kepadatan Populasi) Salah satu metode untuk menganalisis dampak kepadatan penduduk terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah adalah dengan menghitung kepadatan penduduk.

Dependency Population (ketergantungan populasi) Ketergantungan populasi usia non-produktif juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis hubungan antara kepadatan penduduk dan keberlanjutan keuangan. Ketergantungan populasi terdiri dari kelompok usia di bawah 16 tahun (anak-anak) dan di atas 65 tahun (lanjut usia). Kelompok ini dianggap sebagai populasi non-produktif secara ekonomi dan bergantung pada populasi usia produktif (16-64 tahun) dalam hal pendapatan dan pengeluaran (Santis, 2020).

Education Level (Tingkat Pendidikan) Tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah berkorelasi dengan kepadatan penduduk dan keberlanjutan keuangan. Tingkat Pendidikan di ukur dengan Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Universitas)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 55 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu satu tahun. PDRB diukur menggunakan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahunan yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.

Tingkat Investasi 56 Investasi didefinisikan sebagai penanaman modal atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Tingkat investasi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisa Deskriptif**

Berdasarkan table 1 diketahui bahwa variable Jumlah penduduk memiliki rata-rata 316,97 dengan rentang yang lebar dari 16 hingga 999 jiwa, menunjukkan ketidakmerataan distribusi penduduk. Pola serupa terlihat pada kepadatan penduduk dengan rata-rata 153,88 dan rentang ekstrem dari 1 hingga 980 jiwa per area. Struktur usia penduduk menunjukkan rata-rata 88,48 untuk penduduk berusia di bawah 15 tahun (rentang 11-528) dan 21,64 untuk penduduk di atas 65 tahun (rentang 1-127). Dari aspek sosial-ekonomi, tingkat pendidikan memiliki rata-rata 21,50 dengan rentang 1-125, sedangkan PDRB menunjukkan rata-rata 4,67 dengan rentang 0-29. Tingkat investasi relatif lebih moderat dengan rata-rata 17,93 dan rentang 6-43. *Financial sustainability* menampilkan variasi yang sangat besar dengan rata-rata Rp 58.027.638.540,72 dan rentang dari -Rp 145.741.596.172 hingga Rp 391.432.256.948

**Table 2. Hasil Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
jumlah penduduk	300	16	999	316.97	220.195	
kepadatan penduduk	300	1	980	153.88	206.917	
usia penduduk < 15 th	300	11	528	88.48	71.511	
usia penduduk > 65 th	300	1	127	21.64	22.084	
tingkat pendidikan	300	1	125	21.50	17.709	
PDRB	300	0	29	4.67	2.503	
tingkat investasi	300	6	43	17.93	6.278	
<i>financial sustainability</i>	300	-145741596172	391432256	58027638540.72	91612786739.497	
			948			
Valid N (listwise)	300					

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2024

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 2 didapatkan adalah tabel hasil dari Uji Normalitas setelah dilakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural pada variabel independen dan dependen, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi pada penelitian ini sebesar  $0,20 > 0,05$  sehingga data pada model penelitian berdistribusi secara normal.

**Table 3. Hasil Uji Normalitas LN**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		298
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02473982
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.047
	Positive	.041
	Negative	-.047
Test Statistic		.047
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2024

#### Uji Multikoleniaritas

Pada Tabel 3 menunjukkan variabel jumlah penduduk memiliki nilai Tolerance 0.130 dan VIF 7.693. Untuk kepadatan penduduk, nilai Tolerance 0.870 dan VIF 1.149. variabel demografis, usia penduduk <15 tahun memiliki nilai Tolerance 0.237 dan VIF 4.221, sementara usia penduduk >65 tahun menunjukkan nilai Tolerance 0.173 dan VIF 5.767. Variabel tingkat pendidikan menunjukkan nilai Tolerance 0.557 dan VIF 1.797, yang mengindikasikan tidak ada masalah multikoleniaritas. Begitu pula dengan PDRB yang memiliki nilai Tolerance 0.954 dan VIF 1.048, serta tingkat investasi dengan Tolerance 0.892 dan VIF 1.122.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error					
1	(Constant)	29.002	.024		1220.411	.000		
	jumlah penduduk	-.013	.006	-.353	-2.370	.018	.130	7.693
	kepadatan penduduk	.002	.001	.103	1.782	.076	.870	1.149
	usia penduduk <15 th	.001	.004	.025	.225	.822	.237	4.221
	usia penduduk >65 th	.008	.004	.250	1.939	.053	.173	5.767
	tingkat pendidikan	-.001	.003	-.036	-.493	.622	.557	1.797
	PDRB	-.011	.004	-.140	-2.554	.011	.954	1.048
	tingkat investasi	-.026	.004	-.341	-5.987	.000	.892	1.122

a. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2024

### Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan hasil yang beragam di antara variabel-variabel penelitian. Beberapa variabel terbukti bebas dari masalah heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi di atas 0.05, meliputi kepadatan penduduk (0.076), usia penduduk <15 tahun (0.822), usia penduduk >65 tahun (0.053), dan tingkat pendidikan (0.622). Namun, ditemukan indikasi heteroskedastisitas pada variabel jumlah penduduk (0.018), PDRB (0.011), dan tingkat investasi (0.000) yang memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05. Meskipun demikian, model regresi ini masih dapat digunakan untuk analisis mengingat beberapa pertimbangan: data yang digunakan merupakan data sosial ekonomi dimana heteroskedastisitas umum terjadi, adanya transformasi logaritma natural pada variabel dependen sebagai upaya mitigasi, serta fakta bahwa heteroskedastisitas tidak mempengaruhi sifat ketidakbiasan dan konsistensi dari estimator OLS, sehingga interpretasi hubungan antar variabel dalam model tetap dapat diandalkan.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error			
1	(Constant)	29.002	.024		1220.411	.000
	jumlah penduduk	-.013	.006	-.353	-2.370	.018
	kepadatan penduduk	.002	.001	.103	1.782	.076
	usia penduduk <15 th	.001	.004	.025	.225	.822
	usia penduduk >65 th	.008	.004	.250	1.939	.053
	tingkat pendidikan	-.001	.003	-.036	-.493	.622
	PDRB	-.011	.004	-.140	-2.554	.011
	tingkat investasi	-.026	.004	-.341	-5.987	.000

a. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2024

### Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi di Tabel 5 Hasil analisis autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1.844. Dengan membandingkan nilai DW terhadap batas bawah ( $dL=1.707$ ) dan batas atas ( $dU=1.841$ ), diperoleh pola  $1.707 < 1.841 < 1.844 < 2.159 < 2.293$ , dimana nilai DW berada di antara  $dU$  dan  $4-dU$ . Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi, baik positif maupun negatif.

**Table 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.404 <sup>a</sup>	.163	.143	.02504	1.844

a. Predictors: (Constant), LN\_X7, LN\_X2, LN\_X6, LN\_X5, LN\_X3, LN\_X4, LN\_X1

b. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2024

### Analisis Regresi Linear Berganda

Dapat dilihat dari table 6 Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan dalam tabel Coefficients, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:  $LN\_Y = 29,002 - 0,013X1 + 0,002X2 + 0,001X3 + 0,008X4 - 0,001X5 - 0,011X6 - 0,026X7$ .

**Table 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	29.002	.024		1220.411	.000
	jumlah penduduk	-.013	.006	-.353	-2.370	.018
	kepadatan penduduk	.002	.001	.103	1.782	.076
	usia penduduk <15 th	.001	.004	.025	.225	.822
	usia penduduk >65 th	.008	.004	.250	1.939	.053
	tingkat pendidikan	-.001	.003	-.036	-.493	.622
	PDRB	-.011	.004	-.140	-2.554	.011
	tingkat investasi	-.026	.004	-.341	-5.987	.000

a. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2024

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan Table 7 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 8,092 dengan nilai signifikansi 0,000 ( $p < 0,05$ ). Nilai signifikansi yang lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 ini menunjukkan bahwa model regresi dinyatakan signifikan secara statistik.

**Tabel 8. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.036	7	.005	8.092	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.182	290	.001		
	Total	.217	297			

a. Dependent Variable: LN\_Y

b. Predictors: (Constant), LN\_X7, LN\_X2, LN\_X6, LN\_X5, LN\_X3, LN\_X4, LN\_X1

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2024

### Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji Sigfinikansi parsial hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai t table dengan nilai t hitung. Hasil uji parsial (uji t) terhadap variabel-variabel independen menunjukkan hasil yang beragam dalam pengaruhnya terhadap *Financial sustainability*. Variabel jumlah penduduk terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan ( $t=-2,370$ ,  $sig=0,018$ ), mendukung hipotesis pertama. Kepadatan penduduk menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan ( $t=1,782$ ,  $sig=0,076$ ), sehingga hipotesis kedua ditolak. Variabel usia penduduk, baik di bawah 15 tahun ( $t=0,225$ ,  $sig=0,822$ ) maupun di atas 65 tahun ( $t=1,939$ ,  $sig=0,053$ ), keduanya menunjukkan arah positif namun tidak signifikan, bertentangan dengan hipotesis yang diajukan. Tingkat pendidikan juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan ( $t=-0,493$ ,  $sig=0,622$ ) dan memiliki arah negatif yang berlawanan dengan hipotesis. PDRB ( $t=-2,554$ ,  $sig=0,011$ ) dan tingkat investasi ( $t=-5,987$ ,  $sig=0,000$ ) keduanya menunjukkan pengaruh signifikan namun dengan arah negatif, bertentangan dengan hipotesis yang mengharapkan pengaruh positif. Dari tujuh hipotesis yang diajukan, hanya hipotesis pertama mengenai pengaruh negatif jumlah penduduk yang terbukti diterima, sementara enam hipotesis lainnya ditolak karena tidak sesuai dengan arah pengaruh yang dihipotesiskan atau tidak signifikan secara statistik.

### Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Pada table 8 hasil menunjukkan nilai R Square sebesar 0.163 atau 16.3%, yang berarti bahwa variabel independent secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen (FS) sebesar 16.3%. Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0.143 atau 14.3% menunjukkan nilai yang lebih kecil karena telah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Sisanya sebesar 85.7% (100% - 14.3%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

**Tabel 9. Uji koefisien determinasi ( R<sup>2</sup> )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.404 <sup>a</sup>	.163	.143	.02504	1.844

a. Predictors: (Constant), LN\_X7, LN\_X2, LN\_X6, LN\_X5, LN\_X3, LN\_X4, LN\_X1

b. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2024

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap *Financial sustainability***

Pengaruh jumlah penduduk terhadap *Financial sustainability* menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan, dengan koefisien sebesar -0,013 dan nilai signifikansi 0,018 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan penurunan dalam tingkat *Financial sustainability* daerah. Dengan kata lain, ketika jumlah penduduk di suatu daerah bertambah, kemampuan daerah tersebut untuk mempertahankan keberlanjutan keuangannya cenderung menurun secara signifikan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rodríguez Bolívar et al. (2016) juga mendukung temuan ini, dimana ia menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan beban fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Rodríguez Bolívar et al. (2016) menekankan bahwa tanpa adanya strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan peningkatan kapasitas ekonomi yang sepadan, pertumbuhan populasi dapat mengancam keberlanjutan keuangan daerah.

### **Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap *Financial sustainability***

Pengaruh kepadatan penduduk terhadap *Financial sustainability* menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan, dengan koefisien sebesar 0,002 dan nilai signifikansi 0,076 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam kepadatan penduduk, baik peningkatan maupun penurunan, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Meskipun arah hubungannya positif, yang berarti ada kecenderungan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi memiliki *Financial sustainability* yang lebih baik, namun pengaruh ini tidak cukup kuat secara statistik. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rodríguez Bolívar et al. (2016), yang menemukan bahwa kepadatan penduduk dapat menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Rodríguez Bolívar et al. (2016) menyoroti bagaimana konsentrasi populasi yang lebih tinggi dapat menurunkan biaya per kapita dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, meskipun efeknya tidak selalu signifikan dan bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada.

### **Pengaruh Ketergantungan Penduduk Usia 15 Tahun ke Bawah Terhadap *Financial Sustainability***

Pengaruh penduduk usia di bawah 15 tahun terhadap *Financial sustainability* menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan, dengan koefisien sebesar 0,001 dan nilai signifikansi 0,822 yang jauh lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Meskipun arah hubungannya positif, yang menunjukkan adanya kecenderungan bahwa proporsi penduduk muda yang lebih tinggi bisa mendukung *Financial sustainability*, namun pengaruh ini tidak cukup kuat secara statistik.

### **Pengaruh Ketergantungan Penduduk Usia 65 Tahun ke Atas Terhadap *Financial sustainability***

Pengaruh penduduk usia di atas 65 tahun terhadap *Financial sustainability* menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan, dengan koefisien sebesar 0,008 dan nilai signifikansi 0,053 yang sedikit lebih besar dari 0,05. Hasil ini

mengindikasikan bahwa perubahan dalam proporsi penduduk lansia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah, meskipun nilai signifikansinya sangat mendekati batas kritis. Arah hubungan positif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa daerah dengan proporsi penduduk lansia yang lebih tinggi memiliki potensi *Financial sustainability* yang lebih baik.

#### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap *Financial sustainability***

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap *Financial sustainability* menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan, dengan koefisien sebesar -0,001 dan nilai signifikansi 0,622 yang jauh lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam tingkat pendidikan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Arah hubungan yang negatif, meskipun sangat kecil, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa peningkatan tingkat pendidikan justru sedikit menurunkan tingkat *Financial sustainability*, walaupun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.

#### **Pengaruh PDRB Terhadap *Financial sustainability***

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal yang memperkirakan adanya pengaruh positif. Hasil ini berbeda dengan penelitian Jungin Kim (2018) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam PDRB berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

#### **Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap *Financial sustainability***

Pengaruh tingkat investasi terhadap *Financial sustainability* menunjukkan hubungan yang negatif dan sangat signifikan, dengan koefisien sebesar -0,026 dan nilai signifikansi 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tingkat investasi justru menurunkan tingkat *Financial sustainability* daerah secara signifikan. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa investasi yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan dampak positif terhadap keberlanjutan keuangan daerah.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari tujuh variabel yang diteliti, tiga variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Financial sustainability*, yaitu jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat investasi. Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan tekanan pada keberlanjutan keuangan daerah. Demikian pula dengan PDRB dan tingkat investasi yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak selalu sejalan dengan peningkatan keberlanjutan keuangan daerah. Sementara itu, variabel lainnya yaitu kepadatan penduduk, usia penduduk di bawah 15 tahun, usia penduduk di atas 65 tahun, dan tingkat pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Financial sustainability*. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas institusional dalam

mengelola berbagai aspek demografis dan ekonomi untuk mendukung keberlanjutan keuangan daerah.

### **Keterbatasan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan data dalam periode waktu tertentu yang mungkin tidak mencerminkan dinamika jangka Panjang
2. Penelitian ini hanya berfokus pada tujuh variabel independen, sementara masih banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi *Financial sustainability*

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Memperluas cakupan penelitian dengan menambah periode waktu dan area geografis
2. Menambahkan variabel-variabel lain yang relevan seperti kualitas tata kelola, kapasitas institusional, dan faktor eksternal

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrews, R. (2015). *Vertical Consolidation and Financial sustainability: Evidence from English Local Government*.
- Barbera, C., Jones, M., Korac, S., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2017). Governmental financial resilience under austerity in Austria, England and Italy: How do local governments cope with financial shocks? *Public Administration*, 95(3), 670–697. <https://doi.org/10.1111/padm.12350>
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & García-Sánchez, I. M. (2017). *Financial sustainability* in local governments: Definition, measurement and determinants. In *Financial sustainability in Public Administration: Exploring the Concept of Financial Health* (pp. 57–83). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-57962-7\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-57962-7_3)
- Bolívar, M. P. R., Galera, A. N., & Muñoz, L. A. (2014). New development: The role of accounting in assessing local government sustainability. *Public Money and Management*, 34(3), 233–236. <https://doi.org/10.1080/09540962.2014.908035>
- Bröthaler, J., Getzner, M., & Haber, G. (2015). Sustainability of local government debt: a case study of Austrian municipalities. *Empirica*, 42(3), 521–546. <https://doi.org/10.1007/s10663-014-9261-3>
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). Drivers for the financial condition of local government: A comparative study between Italy and Spain. *Lex Localis*, 13(2), 161–184. [https://doi.org/10.4335/13.2.161-184\(2015\)](https://doi.org/10.4335/13.2.161-184(2015))
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2022). Budget transparency and *Financial sustainability*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 210–234. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0025>
- DiMaggio, P., & Powell, W. W. (2010). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (translated by G. Yudin). *Journal of Economic Sociology*, 11(1), 34–56. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2010-1-34-56>

- Drew, J., & Dollery, B. (2016). A Factor Analytic Assessment of *Financial sustainability*: The Case of New South Wales Local Government. *Australian Accounting Review*, 26(2), 132–140. <https://doi.org/10.1111/auar.12092>
- Hadler, M. (2015). Institutionalism and Neo-institutionalism: History of the Concepts. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 186–189). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.03187-1>
- Hoyos, D. (2010). *Sustainable Development in the Brundtland Report and Its Distortion: Implications for Development Economics and International Cooperation* Iñaki Arto BC3-Basque Centre for Climate Change. <https://www.researchgate.net/publication/278036532>
- IPSASB. (2013). *Final Pronouncement REPORTING ON THE LONG-TERM SUSTAINABILITY OF AN ENTITY'S FINANCES CONTENTS*.
- Kim, J. (2018). Collaborative leadership and *Financial sustainability* in local government. *Local Government Studies*, 44(6), 874–893. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1512490>
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2023). *Financial sustainability* of Local Governments in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.48133>
- Navarro-Galera, A., Alcaide-Muñoz, L., López-Subires, M. D., & Rodríguez-Bolívar, M. P. (2021). Identifying risk determinants of the *Financial sustainability* of regional governments. *Public Money and Management*, 41(3), 255–263. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1684025>
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>
- Pedro, M., & Bolívar, R. (2017). *Financial sustainability in Public Administration Exploring the Concept of Financial Health*.
- Powell, W. W., & Bromley, P. (2015). New Institutionalism in the Analysis of Complex Organizations. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 764–769). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32181-X>
- Riahi, O., & Khoufi, W. (2019). Understanding IFRS adoption: Consideration of the institutional dimension through a behavioral context. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(4), 543–570. <https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2017-0034>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2016). Risk Factors and Drivers of *Financial sustainability* in Local Government: An Empirical Study. *Local Government Studies*, 42(1), 29–51. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., López Subirés, M. D., & Alcaide Muñoz, L. (2018). Analysing the accounting measurement of *Financial sustainability* in local governments through political factors. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(8), 2135–2164. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2016-2754>
- Santis, S. (2020). The demographic and economic determinants of *Financial sustainability*: An analysis of Italian local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/su12187599>

- Sinervo, L. M. (2020). *Financial sustainability* of local governments in the eyes of Finnish local politicians. *Sustainability (Switzerland)*, 12(23), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su122310207>
- Slembeck, T., Jans, A., & Leu, T. (2014). A politico-economic perspective on *Financial sustainability*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 26(1), 140–164. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-26-01-2014-B006>
- Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., Galera, A. N., & Bolívar, M. P. R. (2019). The influence of socio-demographic factors on *Financial sustainability* of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 11(21). <https://doi.org/10.3390/su11216008>
- Syamsul, S. (2020). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tpkd) Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185–204. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Tri Wardhani, D. (2020). Menguji Faktor Determinan *Financial sustainability* Pada Sektor Pemerintah. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4, Issue 1). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>
- Wällstedt, N., Grossi, G., & Almqvist, R. (2014). *Organisational solutions for Financial sustainability. A comparative case study from the Swedish Municipalities*. [www.natkom.se](http://www.natkom.se).
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan *Financial sustainability* pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>